



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

EDISI, KAMIS 01 AGUSTUS 2024



RINGKASAN BERITA HARI INI

PLT BUPATI SERAHKAN KARTU BPJS KETENAGAKERJAAN PADA 13.249 PEKERJA RENTAN

Sidoarjo, Pojok Kiri
Plt. Bupati Sidoarjo H. Subandi menyerahkan Kartu Ketenagakerjaan (KK) dan Jaminan Kesehatan Kerja (JKK) bagi pekerja rentan...



Plt. Bupati Sidoarjo H. Subandi menyerahkan Kartu Ketenagakerjaan (KK) dan Jaminan Kesehatan Kerja (JKK) bagi pekerja rentan...

Serahkan Kartu BPJS Ketenagakerjaan 13.249 Pekerja Rentan

SIDOARJO - Plt. Bupati Sidoarjo H. Subandi bersama Dinas Ketenagakerjaan Sidoarjo, Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo beserta BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo...



Penyerahan kartu BPJS Ketenagakerjaan 13.249 pekerja Sidoarjo

pekerja. Program BPJS Ketenagakerjaan ini kedepannya diharapkan dapat terus berlanjut dan dapat menjangkau lebih banyak pekerja lainnya di Sidoarjo.



CEK LAPANGAN: Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara Haswan Boris (kanan) meninjau kondisi Jembatan Kedungpeluk, Sidoarjo, kemarin.

Jadi Perhatian, Kemensetneg Tinjau Kedungpeluk

SIDOARJO - Putusnya jembatan di Desa Kedungpeluk, Kecamatan Candi, menjadi perhatian nasional. Karena itu, Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Haswan Boris Muda Harahap datang langsung untuk meninjau kondisi jembatan tersebut kemarin (31/7).



Plt Bupati Jelaskan Raperda Perubahan APBD

Sidoarjo, Pojok Kiri
Plt. Bupati Sidoarjo, H. Subandi menyampaikan nota penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Kab. Sidoarjo tahun 2024...

Lebih lanjut Plt Bupati Sidoarjo sampaikan bahwa perubahan anggaran telah disesuaikan dengan program prioritas pembangunan Kab. Sidoarjo.



Plt. Bupati Sidoarjo Subandi sampaikan nota penjelasan Raperda

OPD Harus Patuh Regulasi

SIDOARJO - Plt. Bupati Sidoarjo, H. Subandi sampaikan nota penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Kab. Sidoarjo 2024 dalam acara Sidang Paripurna DPRD Kab. Sidoarjo...

Raperda Perubahan APBD Sesuai Prioritas Pembangunan

SIDOARJO-Plt. Bupati Sidoarjo Subandi sampaikan nota penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Sidoarjo 2024. Kegiatan itu dilaksanakan dalam acara Sidang Paripurna DPRD Sidoarjo di Ruang Rapat Sidang Paripurna.



KOMPAK : Plt. Bupati Sidoarjo Subandi (kiri) bersama pimpinan DPRD Sidoarjo.

Subandi menyampaikan rincian rancangan perubahan APBD Kab. Sidoarjo tahun 2024 baik dari pendapatan daerah ataupun belanja daerah.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Oleh karena target kinerjanya yang harus dicapai untuk perwujudan visi dan misi daerah tersebut mengingat pentingnya ini diharapkan apa yang kita bahas dalam bidang bukan sekedar formalitas belaka kemasan hukum harus dapat diwujudkan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Rancangan peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo tentang rencana perubahan anggaran pendapatan belanja daerah Tahun Anggaran 2024 dan memperhatikan nota penjelasan yang disampaikan oleh Plt Bupati maka kami menyampaikan pandangan umum sebagai berikut.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memberikan bantuan sosial kepada kelompok atau anggota masyarakat berupa belanja untuk bantuan kegiatan lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan yang berupa batuan uang kepada para guru PAUD tingkat SD serta bantuan pendidikan sekolah gratis Apa bentuk monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan hal tersebut dan Apa kriteria penerima bantuan tersebut dan apakah penerima bantuan sosial setelah sesuai dengan yang diperuntukkan.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan melaksanakan kebijakan penerimaan pembiayaan mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah mengutamakan wajib mengutamakan belanja wajib dan prioritas menganggarkan belanja bersifat konsumtif secara efisien dan efektif serta melaksanakan kegiatan dengan tepat waktu apakah sudah ada sistem atau misalnya pemberian sanksi kepada yang belum melaksanakan kebijakan tersebut.” Pungkasnya (Sud)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Untuk itu saya tawarkan kepada sidang paripurna Apakah pandangan umum fraksi-fraksi akan disampaikan sendiri atau perwakilan, ” Bilangnya

Sementara Anang Ma’ruf dari fraksi PKS dan mewakili presidangan yang lain DPRD Kabupaten Sidoarjo tentang Rancangan peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo tentang perubahan anggaran pendapatan daerah belanja daerah Tahun Anggaran 2024.

Pandangan umum fraksi terhadap Rancangan peraturan daerah Sidoarjo tentang perubahan anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 berkaitan dengan proses pembahasan rancangan rancangan Peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2004 pada hari ini fraksi kami menilai ini sangat penting untuk dibahas karena adanya dinamisasi kebutuhan rakyat.



Pemerintah daerah sudah melakukan Respon yang tepat untuk pemenuhan kebutuhan rakyat melalui alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang tepat dan terukur perubahan anggaran pendapatan daerah dituangkan dalam Rancangan peraturan daerah merupakan amat yang amanat yang ada dalam pasal 23 sampai 24 pemerintah peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 perubahan APBD merupakan penyelesaian anggaran pendapatan belanja dan pembiayaan daerah terhadap perkembangan dan atau perubahan keadaan terkini perubahan anggaran tersebut harus didahului dengan revisi atau perubahan kebijakan umum.

Selanjutnya dapat menjadi dasar berubahnya dokumen perubahan daerah perubahan APBD tahun 2024 ini nanti seharusnya diarahkan untuk memenuhi rencana pelaksanaan kegiatan yang mendesak atas respon perkembangan terkini serta Menindaklanjuti kebijakan pemerintah daerah untuk dasar-dasar pencapaian indikator kerja tujuan dan sasaran sesuai dengan target tahun tahapan awal rpjmd 2021 2026 dan target kinerja tahun rkpd 2024 yang pada APBD awal atau APBD murni tahun 2024 masih membutuhkan tambahan.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Kartu e-voucher yang dikeluarkan PT ISS sebagai alat pembayaran sistem digital atas retribusi parkir di Sidoarjo.

Untuk sementara, lanjut Dian, uji coba pelayanan baru ini diterapkan bagi kendaraan roda dua, atau sepeda motor. Sedangkan untuk mobil akan menyusul setelah mendapat respon positif masyarakat. "Dalam uji coba ini akan terus kita perluas titik-titiknya. Tentunya juga ada evaluasi sampai pelayanan ini benar-benar berjalan baik, dan siap diluncurkan pada September mendatang," tegasnya.

Selain memberi kemudahan dan kecepatan pelayanan, Dian menambahkan pembayaran retribusi parkir sistem digital ini dapat memberikan beberapa keuntungan lain bagi masyarakat. Di antaranya, dapat mengurangi beban bayar retribusi parkir. Karena setelah membayar satu kali parkir, pengendara tidak perlu lagi membayar saat parkir kembali, atau bahkan berkali-kali parkir di tempat lain pada hari sama di area yang dikelola PT ISS.

Pengendara tinggal menunjukkan kartu e-vouchernya ke petugas operator (juru parkir) di lapangan, lalu ditape in dan tape out pada handphone yang dipasang aplikasi khusus layanan tersebut. "Kalau dalam hari itu sudah pernah membayar retribusi parkir, maka kami jamin saldonya tidak berkurang saat e-vouchernya ditape in dan tape out saat parkir," ujar Dian. "Jadi meski berkali-kali parkir dalam sehari, pengendara cukup membayar satu kali saja, yakni Rp 2.000," tegas Dian.

Yang juga menguntungkan, masyarakat mendapatkan kepastian nominal bayar parkir sesuai ketentuan. Mengingat, bukan rahasia lagi kalau selama ini ada petugas parkir yang nakal dengan menarif retribusi parkir melebihi dari ketentuan. Namun dengan pembayaran sistem digital ini, nominalnya sudah terprogram, sekali parkir tarifnya Rp 2.000, berlaku untuk berkali-kali parkir di titik berbeda selama 24 jam. Ini juga dapat meminimalisasi kebocoran.

Dalam uji coba ini, pihak PT ISS telah mengeluarkan 225 kartu e-voucher dari 500 kartu yang dipersiapkan. Jumlahnya akan terus ditambah, sejangka pihaknya membuka gerai resmi dan atau menjalin kerjasama dengan OPD jajaran Pemkab Sidoarjo dan tempat perbelanjaan (swalayan). Seperti kartu e-tol, masyarakat bisa top up saldo ke gerai resmi kami atau tempat-tempat perbelanjaan. Minimal top up sebesar Rp 10.000," kata Dian.

Dengan mengusung motto parkir cashless (non tunai) dan paperless (karcis elektronik), pihaknya berharap inovasi sistem parkir digital ini dapat memberikan manfaat nyata bagi pengguna parkir. Juga meningkatkan mutu kesejahteraan SDM perparkiran yang ada serta dapat meningkatkan kualitas layanan publik di Kabupaten Sidoarjo. (*/ful)

Penyampaian Pandangan Umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo terhadap Perda Kabupaten Sidoarjo



2.8k
SHARES



Sidoarjo, Sekilasma.com-Tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2024 berdasarkan laporan sekretaris DPRD Kabupaten Sidoarjo.

Ketua DPRD Sidoarjo H Usman Menyampaikan Rapat paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo rapat kedua masa persidangan tahun sidang 2024 pada hari ini Rabu 31 Juli 2024 kami buka dan kami nyatakan terbuka untuk umum dan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo terhadap Perda Kabupaten Sidoarjo tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2024.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Sementara Ketua Baznas Sidoarjo, Chasbil Azis Salju Sodar menambahkan, kegiatan penyerahan bantuan bagi penerima di Kecamatan Tarik ini merupakan langkah awal. Ke depannya, program bantuan bakal disalurkan di semua kecamatan di Sidoarjo. Terdapat 247 penerima manfaat di Kecamatan Tarik yang menerima bantuan Pemerintah Sidoarjo melalui Baznas. Setelah itu, bergeser ke 17 kecamatan lainnya.

"Kegiatan sosial ini, merupakan pilot project kami melalui dana zakat infaq sadaqah. Di awal terdapat di 3 kecamatan yakni Kecamatan Balongbendo, Prambon dan Kecamatan Tarik. Ke depan akan kita lakukan di 18 kecamatan lainnya," tandasnya. Ary/Waw



Inovasi Layanan Parkir, PT ISS Uji Coba Terapkan Bayar Sistem E-Voucher

"Dalam uji coba ini akan terus kita perluas titik-titiknya. Tentunya juga ada evaluasi sampai pelayanan ini benar-benar berjalan baik, dan siap diluncurkan pada September mendatang," kata Dian Sutjipto, Direktur Operasional PT ISS.

© Jul 31, 2024 - 20:52



PT ISS mengeluarkan kartu e-voucher sebagai alat pembayaran sistem digital retribusi parkir di Sidoarjo yang mulai diujicoba pada Rabu (31/7) siang tadi.

NUSADAILY – SIDOARJO ; Sebagai bentuk inovasi pelayanan parkir, PT Indonesia Sarana Service (ISS) mengeluarkan kartu elektronik voucher (e-voucher). Ini merupakan alat pembayaran retribusi parkir secara digital yang bertujuan mempermudah sekaligus meringankan beban masyarakat membayar retribusi parkir di wilayah Sidoarjo.

PT ISS adalah pihak swasta yang dipercaya Pemkab Sidoarjo mengelola pelayanan parkir pada 87 titik di wilayah Delta tersebut. Dari hasil pengelolaan ini, pihaknya telah diwajibkan setor Pemkab Sidoarjo, sebagai pendapatan asli daerah sebesar Rp 6,7 miliar dalam setahun atau sekitar Rp 500 juta perbulan.

Dalam kerjasama ini PT ISS juga berkewajiban meningkatkan pelayanan dalam pengelolaan parkir itu kepada masyarakat, termasuk menerapkan sistem digitalisasi sebagai bentuk inovasi dalam pelayanan parkir. Setelah menerapkan sistem gateway, seperti di kawasan parkir GOR Delta Sidoarjo, dengan memasang palang pintu masuk keluar kendaraan roda dua maupun empat, kali ini menerapkan sistem digital dengan mengeluarkan kartu e-voucher, sebagai alat pembayaran retribusi parkir di Sidoarjo.

Inovasi baru dalam meningkatkan pelayanan publik ini mulai diuji coba pada Rabu (31/7) pagi tadi. "Pembayaran retribusi parkir dengan sistem e-voucher ini kami ujicobakan di Puskemas Sukodoro dan Buduran. Alhamdulillah, respon masyarakat cukup bagus. Inovasi kami dinilai positif karena kemudahan," kata Dian Sutjipto, Direktur Operasional PT ISS. "Membayar dengan memakai e-voucher tak lebih dari 4 detik sudah kelar," tambahnya.



Pemkab Dan Baznas Sidoarjo Bagi-Bagi Bantuan Untuk 247 Warga Tarik, Mulai Kursi Roda Hingga Beasiswa

REDAKSI 31 JULI 2024 18:37:13



SERAHKAN - Plt Bupati Sidoarjo, Subandi bersama Baznas Sidoarjo menyerahkan berbagai bentuk bantuan untuk 247 warga di Kecamatan Tarik, Sidoarjo, Rabu (31/07/2024).

Sidoarjo (republikjatim.com) - Plt Bupati Sidoarjo, Subandi bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sidoarjo menyerahkan berbagai bantuan untuk 247 warga di Kecamatan Tarik, Rabu (31/06/2024).

Beberapa bantuan yang diserahkan itu, diantaranya 10 orang menerima bantuan kursi roda, 3 orang mendapat sepeda, 3 bantuan untuk masjid dan musala, 158 warga penerima manfaat untuk biaya hidup dan 73 penerima beasiswa.

"Berbagai bantuan ini merupakan bentuk nyata dari komitmen Pemkab Sidoarjo dan Baznas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sidoarjo," ujar Subandi.



Pihaknya berharap, bantuan ini tidak hanya meringankan beban penerima. Akan tetapi, juga dapat memberikan dorongan untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama.

"Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang kurang mampu di Sidoarjo," katanya.



Subandi menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kerjasama antara pemerintah daerah dan Baznas, menekankan pentingnya sinergi antara berbagai pihak untuk memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran dan dapat memberi manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Baznas Sidoarjo telah melaksanakan berbagai program bantuan. Mulai dari distribusi sembako hingga program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Semuanya, bertujuan untuk membantu masyarakat kurang mampu," ungkapnya.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Dengan bantuan program ini diharapkan para pekerja dapat menjalankan tugasnya dengan lebih tenang dan merasa dihargai. Program ini juga bentuk apresiasi atas jeri payah mereka dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat,” Ujar H.Subandi. Perlindungan sosial untuk para pekerja merupakan bentuk investasi jangka panjang dengan memberikan perlindungan yang memadai bagi pekerja. Program BPJS Ketenagakerjaan ini kedepannya diharapkan dapat terus berlanjut dan dapat menjangkau lebih banyak pekerja lainnya di Sidoarjo. “Program perlindungan sosial ini bukan hanya bentuk asuransi saja tapi juga investasi jangka panjang dalam memberikan perlindungan kerja.



Diharapkan hasil dari pekerja kedepannya dapat meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan produktivitas daya saing daerah," Tutur Plt. Bupati Sidoarjo. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sidoarjo, Ainun Amalia menekankan Program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan bentuk perlindungan kepada para pekerja di Sidoarjo. Anggaran didapatkan dari DBHCHT Kabupaten Sidoarjo tahun 2024. "Program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan ini bentuk proteksi kepada pekerja apabila terjadi kecelakaan kerja, bahkan jika ada hingga kematian. Memberikan keamanan dan kenyamanan pada penerima program dalam melakukan aktivitasnya yang murni dari dana DBHCHT dengan prioritas pekerja rentan Kabupaten Sidoarjo tahun 2024," Ungkapnya. (Ali)



Plt. Bupati Sidoarjo Serahkan Kartu Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Pada 13.249 Pekerja Rentan Sidoarjo



Meja Redaksi 2 Min Read
July 31, 2024



Keterangan Foto: Plt. Bupati Sidoarjo Serahkan Kartu Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Pada 13.249 Pekerja Rentan Sidoarjo.

Sidoarjo, eksklusif.co.id – Plt. Bupati Sidoarjo H.Subandi bersama Dinas Ketenagakerjaan Sidoarjo, Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo beserta BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo melaunching dan sosialisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja petani, nelayan, guru PAUD dan para pekerja rentan di Ballroom Hotel Luminor Sidoarjo,

Selasa (30/7). Sedikitnya 13.249 pekerja rentan akan menerima manfaat dari program sosial BPJS Ketenagakerjaan dengan rincian 8.334 petani, 330 nelayan, 3.137 guru PAUD dan 948 pekerja rentan di wilayah Kabupaten Sidoarjo akan



menerima kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang bersumber dari anggaran. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dengan prioritas pekerja rentan Kabupaten Sidoarjo tahun 2024 selama 6 bulan terhitung bulan Juli hingga Desember 2024.

Plt. Bupati H.Subandi yang didampingi oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sidoarjo Novias Dewo Santoso, Sekretaris Daerah Sidoarjo Fenny Apridawati, Kepala Dinas Tenaga Kerja Ainun Amalia, Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo, Eni Rustianingsih juga menyerahkan secara simbolis santunan jaminan kematian BPJS ketenagakerjaan kepada 4 warganya. Dalam sambutannya, Plt. Bupati Sidoarjo H.Subandi mengungkapkan program ini adalah bentuk kepedulian Pemkab Sidoarjo terhadap kesejahteraan pekerja di Sidoarjo. Selain itu juga, ini merupakan bentuk apresiasi kepada para pekerja yang telah berkontribusi kepada Kabupaten Sidoarjo. "Program ini menunjukkan kepedulian untuk kesejahteraan para pekerja karena mereka adalah pilar penting dalam pembangunan daerah.

Luncurkan Kartu E-Voucher, Rp 2 Ribu Parkir di Banyak Titik

Sekali Bayar untuk Sehari

SIDOARJO - PT Indonesia Sarana Service (ISS)-KSO meluncurkan *e-voucher* parkir. Mirip kartu *e-toll*. Sekali tap, bisa parkir di seluruh Sidoarjo.

PT ISS-KSO sebagai pengelola layanan parkir di Sidoarjo kemarin (31/7) siang melakukan uji coba penggunaan *e-voucher* parkir di Puskesmas Buduran dan Puskesmas Sukodono.

Pengguna parkir di Sidoarjo tinggal tap kartu miliknya ke petugas. Satu kartu untuk



SEKALI BAYAR: Direktur Operasional PT ISS KSO Dian Sutjipto menunjukkan e-voucher parkir yang mulai diuji coba kemarin.

satu pengguna. Sekali tap cukup bayar Rp 2.000 sesuai tarif parkir untuk motor. Menariknya, dalam sehari

hanya satu kali bayar. Meskipun, pengguna parkir pindah di seluruh titik parkir. Direktur Operasional PT

ISS-KSO Dian Sutjipto mencontohkan, jika sudah tap sekali saat parkir di GOR, ketika akan parkir di titik lainnya seperti di Jalan Gajah Mada warga tidak perlu bayar lagi. Hanya tap. "Jadi, Rp 2.000 bisa buat sehari. Tinggal tap ke petugas di tiap titik parkir," kata Dian. Namun, itu hanya berlaku di 87 titik yang sudah dikerjasamakan antara PT ISS-KSO dan dinas perhubungan (dishub).

Dian menyebutkan, saat ini masih tahap uji coba. Minggu depan uji coba berlanjut ke titik lainnya. "Paling lambat September

mulai bisa digunakan," katanya. Di masa uji coba ini, sudah 225 kartu yang beredar. Dian mengatakan, ke depan kartu bisa didapat di agen tertentu, kantor OPD, hingga gerai minimarket.

Pihaknya akan mengumumkan titik mana saja yang menyediakan kartu. "Nanti bisa di *top up*, minimal *top up* Rp 10 ribu. Jadi, ini *cashless* dan *paperless*," ujarnya. Histori parkir maupun struk parkir bisa didapat cukup dengan *scan barcode* yang ada di kartu masing-masing. Sementara itu, pihaknya mengawali untuk roda dua. Roda empat menyusul. (uzi/c19/any)

CS Dipindai dengan CamScanner

Jawa Pos



JAUHI NARKOBA: Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto didampingi Rektor Umsida Hidayatullah membuka acara road show generasi emas tanpa narkoba di kampus Umsida kemarin.

Polda Jatim Sosialisasikan Bahaya Narkoba kepada 1.500 Siswa dan Santri

SIDOARJO - Polda Jawa Timur menggelar *road show* sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba kepada ribuan pelajar dan santri di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) kemarin (31/7).

Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto membuka langsung *road show* tersebut. Sekitar 1.500 siswa dan santri dari Sidoarjo, Mojokerto, hingga Blitar datang untuk mendapatkan pembekalan tentang bahaya narkoba. "Ada kurang lebih pelajar dan santri

dari sembilan kabupaten-kota," katanya.

Imam mengatakan, pemahaman dan kesadaran terkait bahaya narkoba harus ditanamkan pihaknya dan institusi pendidikan sejak di bangku sekolah. "Kita harus menarkan dampak negatif bagi pengguna di kalangan remaja ini seperti apa," tuturnya.

Terlebih, pelajar juga menjadi salah satu sasaran dari bandar dan pengedar. Imam mengungkapkan

bahwa ini merupakan program rutin yang memang sudah dilakukan dan akan dilanjutkan ke beberapa kota-kabupaten lainnya. "Selain dari pengungkapan dan penyelidikan, sosialisasi serta edukasi jadi peran kami," ujarnya. Imam menjelaskan, fungsi polisi dalam pemberantasan narkoba ini tidak lepas juga dari dukungan masyarakat. "Tentu peran aktif masyarakat ini jadi faktor yang penting. Di sisi lain, rehabilitasi

narkoba yang ditangani akan terus kita gelar," tuturnya.

Selama satu semester 2024 ini, Ditresnarkoba Polda Jawa Timur berhasil mengungkap 1.701 perkara penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Dari ribuan perkara di semester ini, Ditresnarkoba Polda Jawa Timur mengamankan 1.753 tersangka.

"Sementara pada 2023 saja kami berhasil mengungkap 1.900 kasus dengan 2.344 tersangka yang diamankan," tuturnya. Angka perkara

narkoba yang ditangani Polda Jawa Timur terbilang tertinggi kedua setelah Polda Metro Jaya.

Acara yang berlangsung sejak pukul 09.30 itu diisi pemateri Dirresnarkoba Polda Jawa Timur Kombespol Robert Da Costa dan beberapa pemateri dari bidang kesehatan. "Kita berharap ini jadi saran interaktif antara polisi dan pelajar untuk mencegah peredaran narkoba," ungkapnya. (eza/c19/any)

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Riset dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

CS Dipindai dengan CamScanner

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Raperda Perubahan APBD Sesuai Prioritas Pembangunan

SIDOARJO-Plt Bupati Sidoarjo Subandi sampaikan nota penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Sidoarjo 2024. Kegiatan itu dilaksanakan dalam acara Sidang Paripurna DPRD Sidoarjo di Ruang Rapat Sidang Paripurna.

Dalam kegiatan itu, Subandi sampaikan rincian rancangan perubahan APBD Sidoarjo tahun 2024 baik dari pendapatan daerah ataupun belanja daerah.

Subandi menyampaikan bahwa perubahan anggaran telah disesuaikan dengan program prioritas pembangunan Sidoarjo. "Rancangan perubahan APBD 2024 telah disesuaikan dalam proses perencanaan pembangunan daerah," ucap Subandi.

● Ke Halaman 10



KOMPAK : Plt Bupati Sidoarjo Subandi (kiri) bersama pimpinan DPRD Sidoarjo.



DITE SURENDRAJAWA POS

CEK LAPANGAN: Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara Haswan Boris (kanan) meninjau kondisi Jembatan Kedungpeluk, Sidoarjo, kemarin.

Jadi Perhatian, Kemensetneg Tinjau Kedungpeluk

SIDOARJO - Putusnya jembatan di Desa Kedungpeluk, Kecamatan Candi, menjadi perhatian nasional. Karena itu, Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Haswan Boris Muda Harahap datang langsung untuk meninjau kondisi jembatan tersebut kemarin (31/7).

Jaswan melihat kondisi jembatan itu didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sidoarjo Dwi Eko Saptono bersama Kepala Desa Kedungpeluk M. Madenan. Beberapa kali Haswan juga berdialog dengan warga.

Dwi maupun Madenan menjelaskan kronologi putusnya jembatan hingga kondisi saat ini. Haswan juga mengecek langsung jembatan sementara yang sudah dibangun secara gotong royong oleh warga. Hasil tinjauan tersebut, Haswan menilai jembatan itu memang sangat urgen dibangun ulang karena menjadi akses distribusi hasil tambak warga. Hanya, dia meminta warga berhati-hati dalam penggunaan jembatan sementara yang dibangun sendiri karena kekuatannya belum terukur.

Dia mengimbau Pemkab Sidoarjo segera membangun jembatan *bailey* seperti yang sudah direncanakan. Sebab, untuk jembatan *bailey*, ada perhitungan bobot yang jelas. Kekuatan jembatannya bisa diketahui.

Proyek jembatan permanen juga segera dilelang dengan panjang 21,7 meter dan lebar 7 meter. Anggaran yang disiapkan sekitar Rp 2,5 miliar. (uzi/c7/any)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Raperda



LOETF/DUTA

Plt. Bupati Sidoarjo Subandi sampaikan nota penjelasan Raperda

OPD Harus Patuh Regulasi

SIDOARJO - Plt. Bupati Sidoarjo, H. Subandi sampaikan nota penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

Canaan Peraturan Daerah (Kaperda) tentang Perubahan APBD Kab. Sidoarjo 2024 dalam acara Sidang Paripurna DPRD Kab. Sidoarjo pada Selasa (30/7/2024) di Ruang Rapat Sidang Paripurna.

Subandi menyampaikan rincian rancangan perubahan APBD Kab. Sidoarjo tahun 2024 baik dari pendapatan daerah ataupun belanja daerah.

Lebih lanjut Plt Bupati Sidoarjo sampaikan bahwa perubahan anggaran telah disesuaikan dengan program prioritas pembangunan Kab. Sidoarjo.

“Rancangan perubahan APBD 2024 telah disesuaikan dalam proses perencanaan pembangunan daerah,”ucap Subandi.

Dalam kesempatan itu, Plt Bupati Sidoarjo, H. Subandi, SH berpesan kepada seluruh OPD di Kab. Sidoarjo agar dapat mengelola keuangan dengan efektif dan efisien serta mematuhi seluruh regulasi yang ada.

“Semoga pengelolaan keuangan daerah ini dapat dilakukan dengan efektif dan efisien mungkin serta mematuhi regulasi yang ada,” tambahnya. ● **Loe**

Serahkan Kartu BPJS Ketenagakerjaan 13.249 Pekerja Rentan

SIDOARJO - Plt. Bupati Sidoarjo H. Subandi bersama Dinas Ketenagakerjaan Sidoarjo, Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo beserta BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo me-launching dan sosialisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja petani, nelayan, guru PAUD dan para pekerja rentan di Ballroom Hotel Luminor Sidoarjo, Selasa (30/7/24) sore.

Sedikitnya 13.249 pekerja rentan akan menerima manfaat dari program sosial BPJS Ketenagakerjaan dengan rincian 8.334 petani, 330 nelayan, 3.137 guru PAUD dan 948 pekerja rentan di wilayah Kabupaten Sidoarjo akan menerima kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang bersumber dari anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dengan prioritas pekerja rentan Kabupaten Sidoarjo tahun 2024 selama 6 bulan terhitung bulan Juli hingga Desember 2024.

Plt. Bupati H. Subandi yang didampingi oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sidoarjo Novias Dewo Santoso, Sekretaris Daerah Sidoarjo Fenny Apridawati, Kepala Dinas Tenaga Kerja Ainun Amalia, Kepala Dinas Pangan dan Perta-



Penyerahan kartu BPJS Ketenagakerjaan 13.249 pekerja Sidoarjo

nian Sidoarjo Eni Rustianingsih juga menyerahkan secara simbolis santunan jaminan kematian BPJS ketenagakerjaan kepada 4 warga.

Plt. Bupati Sidoarjo H. Subandi mengungkapkan program ini adalah bentuk kepedulian Pemkab Sidoarjo terhadap kesejahteraan pekerja di Sidoarjo. Selain itu juga,

ini merupakan bentuk apresiasi kepada para pekerja yang telah berkontribusi kepada Kabupaten Sidoarjo.

"Program ini menunjukkan kepedulian untuk kesejahteraan para pekerja karena mereka adalah pilar penting dalam pembangunan daerah. Dengan bantuan program ini diharapkan para pekerja da-

pat menjalankan tugasnya dengan lebih tenang dan merasa dihargai. Program ini juga bentuk apresiasi atas jeri payah mereka dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat," ujar Subandi.

Perlindungan sosial untuk para pekerja merupakan bentuk investasi jangka panjang dengan memberikan perlindungan yang memadai bagi

pekerja. Program BPJS Ketenagakerjaan ini kedepannya diharapkan dapat terus berlanjut dan dapat menjangkau lebih banyak pekerja lainnya di Sidoarjo.

"Program perlindungan sosial ini bukan hanya bentuk asuransi saja tapi juga investasi jangka panjang dalam memberikan perlindungan kerja. Diharapkan hasil dari pekerja kedepannya dapat meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan produktivitas daya saing daerah," tutur Plt. Bupati Sidoarjo.

Terpisah Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sidoarjo, Ainun Amalia Rabu (31/7/24) menekankan Program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan bentuk perlindungan kepada para pekerja di Sidoarjo. Anggaran didapatkan dari DBHCHT Kabupaten Sidoarjo tahun 2024.

"Program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan ini bentuk proteksi kepada pekerja apabila terjadi kecelakaan kerja, bahkan jika ada hingga kematian. Memberikan keamanan dan kenyamanan pada penerima program dalam melakukan aktivitasnya yang murni dari dana DBHCHT dengan prioritas pekerja rentan Kabupaten Sidoarjo tahun 2024," ungkapnya. • Loe

PLT BUPATI SERAHKAN KARTU BPJS KETENAGAKERJAAN PADA 13.249 PEKERJA RENTAN

Sidoarjo, Pojok Kiri

Plt. Bupati Sidoarjo H. Subandi bersama Dinas Ketenagakerjaan Sidoarjo, Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo beserta BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo melaunching dan sosialisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja petani, nelayan, guru PAUD dan para pekerja rentan di Ballroom Hotel Luminoir Sidoarjo, Selasa (30/7).

Sedikitnya 13.249 pekerja rentan akan menerima manfaat dari program sosial BPJS Ketenagakerjaan dengan rincian 8.334 petani, 330 nelayan, 3.137 guru PAUD dan 948 pekerja rentan di wilayah Kabupaten Sidoarjo akan menerima kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang bersumber dari anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dengan prioritas pekerja rentan Kabupaten Sidoarjo tahun 2024 selama 6 bulan terhitung bulan Juli hingga Desember 2024.

Plt. Bupati H. Subandi yang didampingi oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sidoarjo Novias Dewo Santoso, Sekretaris Daerah Sidoarjo Fenny Apridawati, Kepala Dinas Tenaga Kerja Ainun Amalia, Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo Eni Rustianingsih juga menyerahkan secara



simbolis santunan jaminan kematian BPJS ketenagakerjaan kepada 4 warganya.

Dalam sambutannya, Plt. Bupati Sidoarjo H. Subandi mengungkapkan program ini adalah bentuk kepedulian Pemkab Sidoarjo terhadap kesejahteraan pekerja di Sidoarjo. Selain itu juga, ini merupakan bentuk apresiasi kepada para pekerja yang telah berkontribusi kepada Kabupaten Sidoarjo.

"Program ini menunjukkan kepedulian untuk kesejahteraan para pekerja karena mereka adalah pilar penting dalam pembangunan daerah.

Dengan bantuan program ini diharapkan para pekerja dapat menjalankan tugasnya dengan lebih tenang dan merasa dihargai. Program ini juga bentuk apresiasi atas jeri payah mereka dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat," ujar H. Subandi.

Perlindungan sosial untuk para pekerja merupakan bentuk investasi jangka panjang dengan memberikan perlindungan yang memadai bagi pekerja. Program BPJS Ketenagakerjaan ini kedepannya diharapkan dapat terus berlanjut dan dapat

menjangkau lebih banyak pekerja lainnya di Sidoarjo.

"Program perlindungan sosial ini bukan hanya bentuk asuransi saja tapi juga investasi jangka panjang dalam memberikan perlindungan kerja. Diharapkan hasil dari pekerja kedepannya dapat meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan produktivitas daya saing daerah," tutur Plt. Bupati Sidoarjo.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sidoarjo, Ainun Amalia menekankan Program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan ini meru-

upakan bentuk perlindungan kepada para pekerja di Sidoarjo. Anggaran didapatkan dari DBHCHT Kabupaten Sidoarjo tahun 2024.

"Program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan ini bentuk proteksi kepada pekerja apabila terjadi kecelakaan kerja, bahkan jika ada hingga kematian. Memberikan keamanan dan kenyamanan pada penerima program dalam melakukan aktivitasnya yang murni dari dana DBHCHT dengan prioritas pekerja rentan Kabupaten Sidoarjo tahun 2024," Ungkapnya. (Khol/Fs)



Plt Bupati Jelaskan Raperda Perubahan APBD

Sidoarjo, Pojok Kiri

Plt. Bupati Sidoarjo, H. Subandi sampaikan nota penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Kab. Sidoarjo 2024 dalam acara Sidang Paripurna DPRD Kab. Sidoarjo

pada Selasa (30/7/2024) di Ruang Rapat Sidang Paripurna.

Dalam kegiatan itu, Subandi sampaikan rincian rancangan perubahan APBD Kab. Sidoarjo tahun 2024 baik dari pendapatan daerah ataupun belanja daerah.

Lebih lanjut Plt Bupati Sidoarjo sampaikan bahwa perubahan anggaran telah disesuaikan dengan program prioritas pembangunan Kab. Sidoarjo.

"Rancangan perubahan APBD 2024 telah disesuaikan dalam proses perenca-

naan pembangunan daerah," ucap Subandi.

Dalam kesempatan itu, Plt Bupati Sidoarjo, H. Subandi, SH sampaikan pesannya kepada seluruh OPD di Kab. Sidoarjo agar dapat mengelola keuangan dengan efektif dan

efisien serta mematuhi seluruh regulasi yang ada.

"Semoga pengelolaan keuangan daerah ini dapat dilakukan dengan efektif dan efisien mungkin serta mematuhi regulasi yang ada," tambahnya. (Khol/ Fs)

POJOK KIRI
KORAN RAKYAT